

RINGKASAN

Penelitian ini membahas permasalahan kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Karesidenan Banyumas meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tergolong baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa empat dari lima kabupaten di Karesidenan Banyumas (Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purbalingga) termasuk dalam daftar sepuluh kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh upah Minimum Kabupaten (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap kemiskinan di Karesidenan Banyumas.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model yang terpilih adalah model FEM. Olah data penelitian ini menggunakan bantuan alat analisis EViews 12.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -4,945 yang artinya setiap kenaikan UMK sebesar satu persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,945 persen. TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar 0,57524, yang artinya setiap penurunan TPT sebesar satu persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,57524 persen. PMDN berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan karena nilai signifikansi yang mencapai 0,7945, Dimana angka tersebut lebih tinggi dari batas signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang melebihi 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel PMDN dan tingkat kemiskinan belum cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan perubahan kemiskinan di wilayah Karesidenan Banyumas.

Pemerintah daerah perlu menyesuaikan besaran UMK dengan mempertimbangkan inflasi, kondisi ekonomi daerah, dan produktivitas tenaga kerja agar kenaikan UMK benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat tanpa membebani sektor usaha. Selain itu, penguatan perlindungan dan peningkatan keterampilan pekerja menjadi langkah penting untuk memperluas dampak positifnya terhadap penurunan kemiskinan. TPT terbukti menjadi faktor paling berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga perlu menjadi prioritas kebijakan dengan cara memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mendorong sektor padat karya. Sementara itu PMDN belum berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif agar manfaat investasi tersebar merata, mampu menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan efek bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

SUMMARY

This study discusses the issue of persistent poverty in the Banyumas Residency area, despite Central Java's relatively strong economic growth. The research is motivated by the fact that four out of five regencies in the Banyumas Residency (Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen, and Purbalingga) are listed among the ten poorest regencies in Central Java. The purpose of this study is to analyze the influence of the District Minimum Wage, Unemployment, and Domestic Investment (PMDN) on poverty in the Banyumas Residency.

This research employs panel data regression analysis, with the Fixed Effect Model (FEM) model. Data processing in this research was assisted by the EViews 12 analysis tool.

Based on the research findings, the Minimum Wage has a negative and significant effect on poverty, with a regression coefficient of -4.945, meaning every one percent increase in Minimum Wage reduces the poverty rate by 4.945 percent, the Unemployment rate has a positive and significant effect on poverty, with a regression coefficient of 0.57524, indicating that every one percent decrease in unemployment rate reduces the poverty rate by 0.5752 percent. Domestic Investment has a negative but insignificant effect on poverty, as its significance value of 0.7945 exceeds the 0.05 threshold, suggesting the relationship between PMDN and poverty levels in the Banyumas Residency area is not statistically strong enough to explain poverty changes.

Local governments need to adjust the amount of the Minimum Wage by considering inflation, regional economic conditions, and labor productivity to ensure that wage increases truly enhance people's purchasing power without overburdening the business sector. In addition, strengthening labor protection and improving workers' skills are essential steps to broaden the positive impact of Minimum Wage on poverty reduction. The Unemployment has proven to be the most influential factor affecting poverty; therefore, it should be prioritized in policy-making by expanding job opportunities, improving the quality of human resources, and promoting labor-intensive industries. Meanwhile, Domestic Investment has not yet shown a significant impact on poverty reduction, indicating the need for more inclusive policies to ensure that investment benefits are evenly distributed, capable of creating new job opportunities, and generating positive effects for low-income communities.

Keywords: *Poverty, Minimal Wage, Unemployment, Domestic Investment.*